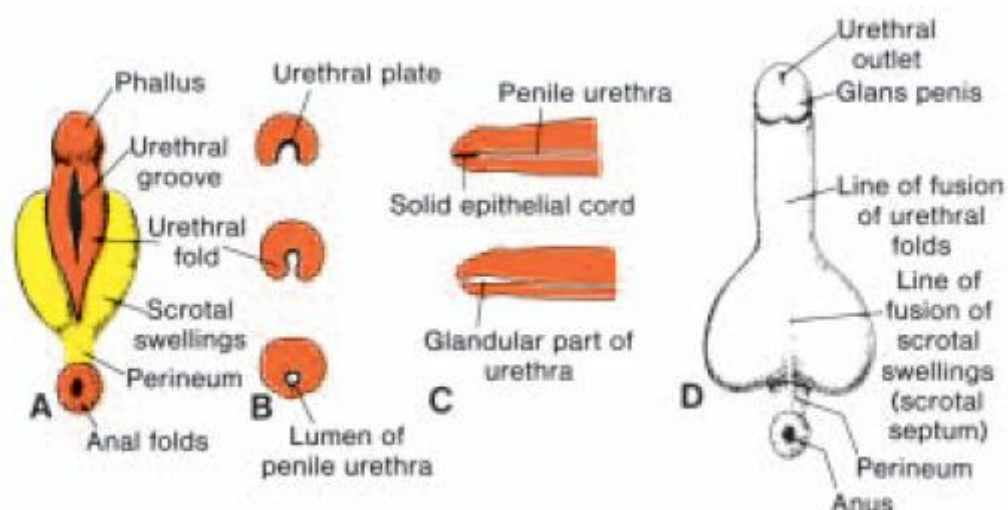


penis dan sensitif seperti penis. Klitoris banyak dialiri pembuluh darah dan urat syaraf, sehingga klitoris merupakan daerah yang sangat sensitif terhadap rangsangan seksual. Klitoris terdiri dari satu daerah bulat atau kepala, disebut kelenjar, dan bagian yang lebih panjang, disebut batang, yang memiliki bentuk-bentuk cekungan mirip dengan yang dipunyai penis. Jaringan dari bibir bagian dalam biasanya menutupi batang klitoris, yang membentuk tudung atau kulit khatan untuk melindunginya. Ukuran dan bentuknya berbeda-beda pada setiap wanita. Klitoris dapat dilihat dengan mendorong kulit selubung klitoris ke belakang. Ada banyak sekali ujung saraf dalam klitoris dan di daerah sekitarnya. Banyaknya ujung saraf dalam klitoris menyebabkannya menjadi sangat sensitif terhadap sentuhan atau tekanan langsung atau tidak langsung. Hal ini mirip dengan penis pada pria. Rangsangan pada daerah klitoris dapat menjadi nikmat, bahkan memberikan pemiliknya kenikmatan seksual merupakan satu-satunya fungsi organ ini yang diketahui, dan klitoris adalah satu-satunya organ manusia yang memiliki pemberi kenikmatan sebagai fungsi utama. Klitoris tidak ada hubungannya dengan kehamilan, menstruasi, atau kencing.²⁰

²⁰ O'Connel HE, Delancey JO, "Clitoral Anatomy in Nulliparous, Healthy, Premenopausal Volunteers Using Unenhanced Magnetic Resonance Imaging", dalam F. Gary Cunningham (et. al.), *Williams Obstetrics* (New York: McGraw-Hill, 2010), 16.



Gambar 2.6

A. Pertumbuhan genitalia eksterna janin laki-laki pada minggu ke-10, B. Potongan melintang palus selama pembentukan penile uretra, C. Pertumbuhan bagian glandula dai penil uretra, D. Baru lahir.

Pada laki-laki, saluran reproduksi berkembang dari duktus Wolffii dan duktus Mulleri berdegenerasi, sedangkan pada perempuan duktus Mulleri yang berkembang menjadi saluran reproduksi dan duktus Wolffii mengalami regresi. Karena kedua sistem duktus tersebut sudah ada sebelum diferensiasi jenis kelamin terjadi, keduanya memiliki potensi untuk berkembang mengikuti kedua jalur saluran reproduksi laki-laki dan perempuan. Perkembangan saluran reproduksi mengikuti jalur laki-laki atau perempuan ditentukan oleh ada tidaknya dua hormon yang disekresikan oleh testis janin; testosteron dan *Mullerian inhibiting factor* (MIF). Suatu hormon yang dikeluarkan oleh plasenta, *human chorionic gonadotropin* (HCG), tampaknya merupakan stimulus bagi sekresi testis embrional ini. Testosteron memicu perkembangan duktus Wolffii menjadi saluran reproduksi laki-laki (epididimis, duktus deferens, duktus

panjang vagina pada perempuan CAIS dewasa sepanjang 2,5 hingga 3,0 cm. Sedangkan studi lain di Inggris mendapatkan panjang rata-rata vagina penderita CAIS yang seksual aktif adalah 8,4 cm, dengan panjang vagina perempuan normal sebesar $11,1 \pm 1$ cm.⁴⁶

Pemeriksaan hormon pada CAIS dewasa menunjukkan peningkatan kadar hormon testosteron dan kadar LH yang tinggi. Setelah pubertas, testosteron tetap tinggi karena tidak adanya umpan balik negatif akibat dari hipotalamus dan hipofise yang tidak sensitif terhadap androgen. Estradiol sering juga ditemukan dalam kadar yang meningkat. Aktivitas estrogen yang meningkat dan aktifitas aromatase yang normal menjadi penentu untuk pertumbuhan payudara. AMH tetap dalam kadar normal karena sekresi dan fungsi sel Sertoli testis tidak berubah. Apabila dalam kadar rentang normal lelaki, maka pemeriksaan lanjutan dengan kariotiping perlu dilakukan. Peranan kariotiping disini amatlah penting dalam menentukan diagnosa.⁴⁷

⁴⁶ Minto Catherine L, dkk. *Sexual function in women with complete androgen insensitivity syndrome*. 157-164

⁴⁷ Marc A. Fritz, MD dan Leon Speroff, MD, *Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility*, (New York: Wolters Kluwer, tt), 367

g. Orang Tua

Selain pasien penderita kerancuan jenis kelamin (*khunthā*), orang tua pasien juga memiliki peran penting dalam penentuan jenis kelamin yang membingungkan. Sebab, setiap kejadian yang dialami pasien penderita kerancuan jenis kelamin sejak lahir hingga dalam masa pertumbuhan terpantau oleh orang tua, sehingga informasi orang tua pasien dapat dijadikan dasar dalam setiap melakukan tindakan medis. Tidak hanya informasi, tetapi pendapat orang tua dalam penentuan jenis kelamin anaknya dibutuhkan agar tidak terjadi kesalah fahaman di kemudian hari. Namun, tidak semua orang tua memahami kelainan yang terjadi pada anaknya yang mengalami kerancuan jenis kelamin. Hal ini dapat dipengaruhi kondisi sosial masyarakat, pendidikan orang tua, dan agama. Oleh karena itu, seharusnya keterangan tim dokter yang menangani kerancuan kelamin harus difahami oleh orang tua sebagai pertimbangan dalam menentukan jenis kelamin, dengan adanya komunikasi orang tua dan tim dokter diharapkan dapat mengambil langkah yang tepat dalam penentuan jenis kelamin *khunthā*.

h. Pertimbangan tokoh Agama

Menyelesaikan persoalan penderita kerancuan jenis kelamin banyak komponen yang perlu diperhatikan, supaya tidak terjadi kesalahan dalam melakukan tindakan medis. Selain norma hukum, norma agama juga perlu menjadi bahan pertimbangan. Sebab jika melakukan tindakan medis sesuai

Jenis kelamin laki-laki atau perempuan sangat berkaitan dengan hukum Islam, beberapa tata cara ibadah membutuhkan klasifikasi laki-laki dan perempuan, namun hukum Islam jarang sekali membicarakan ibadah seorang *khunthā*. Oleh karena itu, untuk menghindari kekosongan hukum para Ulama berijtihad untuk mengatasi permasalahan *khunthā*. Ijtihad yang dilakukan bertujuan untuk mencari tahu apakah *khunthā* masuk dalam kategori seorang laki-laki atau perempuan, para ulama meneliti melalui ciri-ciri fisik yang ada pada *khunthā*. Untuk menentukan laki-laki atau perempuan ulama berbeda cara mengidentifikasi *khunthā* dihukumi sebagai laki-laki atau perempuan.

Ibnu Qudamah berpandangan bahwa *khunthā* dapat ditentukan sebagai laki-laki atau perempuan, walaupun hanya ada satu karakteristik fisik yang terlihat. Saat anak lahir dalam keadaan *khunthā* upaya yang dilakukan agar dapat menentukan jenis kelamin adalah dengan mengamati mana yang lebih mendominasi dari dua jenis kelamin tersebut, baik dalam bentuk maupun fungsinya. Cara yang dilakukan untuk menentukan jenis kelamin *khunthā* adalah melalui cara buang air kecil. Jika buang air kecil melalui organ laki-laki maka *khunthā* tersebut dihukumi sebagai laki-laki, sedangkan jika buang air kecil melalui organ reproduksi perempuan, maka *khunthā* tersebut dihukumi sebagai seorang perempuan. Sedangkan, jika *khunthā* buang air kecil dengan kedua organ reproduksinya, maka langkah selanjutnya adalah dengan melihat organ reproduksi yang mengeluarkan air terlebih dahulu. Apabila dengan cara tersebut belum dapat diketahui, karena saat buang air kecil melauli organ reproduksi laki-laki dan perempuan secara bersamaan dan

Maksudnya, tidak boleh menikahi dan dinikahi. Imām Ibn Munḍir dari kalangan Syafi'iyah dalam satu riwayat, memperbolehkan *khunthā* untuk menikah dengan siapa saja yang ia kehendaki. Namun di situ tidak diriwayatkan tentang apa yang harus dipilih oleh *khunthā*. Menurut Al 'Uqbani, mungkin yang dimaksud adalah, ketika *khunthā* memilih salah satu (antara pria atau wanita), lalu menikah dengannya. Adapun jika *khunthā* hanya memilih dan tidak sampai menikah, maka tidak boleh melarang dia untuk berpaling ke pilihan yang lain.

Ulama' Hanabilah memiliki pendapat yang berbeda. *Khunthā* dinikahkan dengan pria, jika dia menyatakan dirinya wanita dan tertarik dengan pria. Karena dia tidak akan dapat melakukan hubungan (pernikahan) kecuali dengan pasangan yang dikehendaki (pria atau wanita). Dan orang lain tidak punya hak (yang kuat) untuk mencampuri (mengintervensi). Maka apapun yang menjadi pilihannya, akan dapat diterima. Sebagaimana ketika seorang wanita mengatakan bahwa dirinya haid atau dalam masa 'iddah, dan seorang *khunthā* terkadang tahu apakah dirinya condong dan tertarik kepada pria atau wanita.

Syeikh Abu Bakar berkata, *khunthā* tidak boleh menikah sampai permasalahannya (pria atau wanita) jelas. Alasannya, karena belum tampak tanda-tanda yang menjadi syarat mutlak diperbolehkannya menikah (yaitu pria dan wanita). Maka tidak diperbolehkannya menikah bagi *khunthā* itu, karena sama halnya jika ia memiliki saudari yang kembar dengan

sebaliknya tidak diperbolehkan dalam agama. Begitu pula memandang aurat orang lain (lebih-lebih lain jenis) adalah haram. Sedangkan kehormatan seseorang tidak hilang walaupun dia meninggal. Maka solusinya adalah dengan ditayammumi menggunakan debu karena adanya udzur (kesulitan) untuk memandikannya.

Sedang cara menayammuminya dengan menggunakan kain jika *khunthā* itu *ajnabi* (orang lain yang tidak memiliki hubungan mahram). Serta menghindari memandang wajah dan tangannya, karena masih dimungkinkan kewanitaannya. Jika yang menayamumi memiliki hubungan mahram, maka tidak perlu menggunakan kain.

Syafi'iyah membagi permasalahan ini dalam beberapa pendapat: *Pertama*, ketika *khunthā* meninggal dan tidak ada mahram sama sekali baik pria atau wanita maka: Jika dia masih kecil dan tidak mendatangkan syahwat bagi orang lain, boleh dimandikan baik oleh pria atau wanita. jika dia sudah besar (remaja atau dewasa) maka ditayammumi lalu di makamkan. Ada juga pendapat bahwa *khunthā* boleh dimandikan. Namun siapa yang memandikan menurut Abū Zaid baik pria atau wanita boleh memandikannya karena darurat dan memasukkannya ke dalam kategori anak-anak.

Hanabilah mengatakan jika *khunthā* berusia 7 tahun ke atas maka ditayammumi dengan menggunakan pelindung (tangan) dari kain atau

shudhūdh al-Matn); (7) Pendekatan *maqāṣid* bisa mengisi *gap* konteks yang hilang dari narasi hadis; (8) *al-Maqāṣid* dalam konteks tujuan Nabi, harus juga digunakan dalam proses kontekstualisasi narasi hadis, berdasarkan pada tujuan kenabian yang diungkapkan oleh ibn ‘Āshūr, yaitu legislasi, pembuatan aturan, pengadilan, kepemimpinan, petunjuk, konsiliasi, saran, konselling, dan non-instruksi; (9) Analisis yang hati-hati atas kepastian ‘*illat*’ menunjukkan bahwa ‘*illat*’ biasanya dapat berubah dan tidak bersifat pasti atau tetap sebagaimana diklaim oleh *uṣūl fiqh* tradisional; (10) Kontroversi tentang legitimasi independen *maṣāliḥ* dihubungkan atau diidentifikasi dengan *Maqāṣid al-Sharī’ah*; (11) *Istiḥsān* merupakan bentuk tujuan hukum yang ditambah pada alasan yuridis. Sementara itu, madhhab-madhhab hukum Islam yang tidak setuju menerapkan *istiḥsān* sesungguhnya telah menggunakan metode yang lain dalam upaya mewujudkan tujuan hukum; (12) Mempertimbangkan cara harusnya tidak terbatas pada sisi negative pendekatan “*consequentialist*” (13) Perluasan pemahaman al-Qarāfi tentang menutup jalan negatif (*sad dharā’i*) yang juga meliputi membuka jalan positif diperluas lagi dengan pertimbangan yang terus menerus tentang hasil akhir yang baik dan yang jelek. (14) Analisis Ibn ‘Āshūr tentang efek budaya Arab dalam narasi teks yang mengembangkan tujuan universalitas dalam hukum. (15) Prinsip “*presumption of continuity*” (*istiṣḥāb*) dihadirkan sebagai

tidak menunjukkan tujuan hukum, maka lebih mendahulukan dalil yang menunjukkan satu tujuan hukum.

- b. Apabila ada satu persoalan hukum terdapat dua dalil, salah satu dalil menunjukkan hukum yang ringan dan dalil lainnya menunjukkan hukum yang berat, maka dalam pertentangan ini terdapat dua pendapat di kalangan ulama. Pendapat pertama lebih memilih hukum yang ringan karena yang menjadi prinsip hukum Islam adalah memberikan kemudahan. Sedangkan pendapat kedua lebih memilih hukum yang berat karena setiap ketetapan hukum memiliki tujuan maslahat bagi mukallaf untuk mengamalkannya, dan sebuah kemaslahatan yang lebih besar justru akan dimunculkan dari pengalaman hukum yang berat sebab lebih optimal dalam upaya pengamalannya.
- c. Apabila terdapat dua dalil yang salah satunya menjelaskan hukum haram sedangkan dalil lainnya menunjukkan *mubāḥ*, dalam pentarjihan ini terdapat tiga pendapat di kalangan ulama. *Pertama*, mayoritas ulama lebih memenangkan hukum haram secara mutlak, dengan alasan karena bila mengerjakan hal yang diharamkan dapat mengantarkan kepada mafsadat, sedangkan meninggalkan hukum *muhāḥ* bukan termasuk dosa dan tidak pula menimbulkan mafsadat. *Kedua*, pendapat yang dipilih oleh al-Qāḍī dan ‘Abd al-Waḥbah dan ‘Abd al-Faraj dari madhhab Mālikī, serta al-Amidi dan ibn al-Ḥāḓib adalah hukum *muhāḥ*. Dengan dalih

